

## **TESIS**

**STRATEGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)  
DALAM MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF  
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019  
( Upaya caleg PPP Salmawati Jamado dalam meraih suara  
pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019 )**

**STRATEGY OF THE DEVELOPMENT UNITED PARTY (PPP)  
IN WINNING LEGISLATIVE ELECTIONS  
MAJENE DISTRICT YEAR 2019  
(Efforts of PPP candidate Salmawati Jamado in gaining votes  
in the 2019 Majene Regency Legislative Election)**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :**

**SAHARUDDIN  
E052201003**



**PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**STRATEGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)  
DALAM MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF  
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019  
( Upaya caleg PPP Salmawati Jamado dalam meraih suara  
pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019 )**

**TESIS**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister**

**Program Studi  
Ilmu Politik**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**SAHARUDDIN  
E052201003**

**Kepada**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PENGESAHAN TESIS

**STRATEGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)  
DALAM MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF  
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019  
( Upaya caleg PPP Salmawati Jamado meraih suara pada  
Pemilihan Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019 )**

Disusun dan diajukan oleh

**SAHARUDDIN  
E052201003**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin pada tanggal **01 Maret 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si

Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si

Nip. 19710917 199703 1 001

Nip. 19710705 199803 2 002

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si

Dr. Phil. Sukri, M.Si

Nip. 19710705 199803 2 002

Nip. 197508182008011008

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang Bertanda Tangan Di bawah ini:

**Nama : SAHARUDDIN**

**NIM : E052201003**

**Program Studi : Magister Ilmu Politik**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil pengambilalihan tulisan, pemikiran dan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil jiplakan (plagiat) karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Makassar, 01 Maret 2023

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is light brown and features a large number '1000' in the center. Below the number, it says 'METERAI TEMPEL' and 'BEDDAAKX223825218'. The stamp is partially obscured by the signature.

Saharuddin

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul : STRATEGI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DALAM MEMENANGKAN PEMILU LEGISLATIF KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 (Upaya Caleg PPP Salmawati Jamado dalam meraih suara pada Pemilu Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019) dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar magister Strata Dua (S2) Program Studi Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Phill. Sukri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Ibu Dr. Ariana Yunus, S. IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad S.IP, M. Si. selaku pembimbing I

( pembimbing utama ) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini dan Dr. Ariana Yunus, S. IP., M.Si. selaku pembimbing II ( Pembimbing Pendamping ) yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan semangat serta motivasi selama penyusunan tesis.

5. Bapak Prof. Dr. H. Armin Arsyad, M.Si. sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
6. Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M. Si sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
7. Bapak Drs. H. Yakub, M.Si., Ph.D sebagai dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis ini.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya dosen di Program Study Ilmu Politik yang telah banyak memberikan ilmunya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, semoga semua ilmu yang diberikan menjadi amal baik.
9. Staf Jurusan Ilmu Politik yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun lewat online.
10. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman seangkatan di program studi Ilmu Politik FISIP UNHAS tahun 2020 atas kebersamaannya selama ini.
12. Kedua Orang tua penulis almarhum Hammadaali dan almahumah Sitti Isa atas ketulusan do'anya selama ini agar berhasil dalam

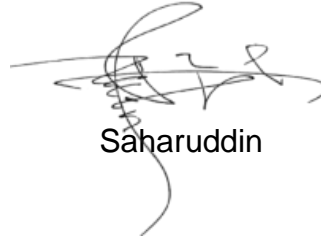
menuntut ilmu hingga akhirnya penulis dapat lagi melanjutkan pendidikan pada program study Ilmu Politik Pasca Sarjana UNHAS.

13. Istri dan anak-anakku serta keluarga, sahabat dan handai taulan yang telah banyak membantu sampai penyelesaian tesis ini, terima kasih atas do'a dan pengorbanan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada semua pembacanya.

Makassar, 01 Maret 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Saharuddin', written over a horizontal line.

Saharuddin

## ABSTRAK

**Saharuddin. E052201003. Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019. (Upaya Caleg PPP Salmawati Jamado dalam meraih suara pada Pemilihan Legislatif di Kabupaten Majene Tahun 2019). ( Dibimbing oleh Prof.Dr.Muhammad, S.IP, M.Si dan Dr.Ariana Yunus, S. IP., M.Si).**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenangkan Pemilu Legislatif dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan caleg PPP Salmawati Jamado dalam meraih suara pada Pemilu Legislatif Kabupaten Majene, serta menganalisis hambatan yang dihadapi Partai Persatuan Pembangunan dalam memenangkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene 2019.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai beberapa informan dipadukan dengan study literatur jurnal dan penelitian ilmiah lainnya. Data kemudian diolah dengan pisau analisis teori Partai Politik, Institusionalisasi Parpol dan Strategi Politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan berhasil memenangkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene tahun 2019 berkat melalui strategi kelembagaan, strategi defensif dan strategi ofensif. Kemenangan PPP diantaranya disumbangkan oleh caleg Salmawati Jamado sebagai peraih suara tertinggi di internal partai PPP dengan memanfaatkan jaringan melalui empat sasaran yaitu Pertama, Jaringan Ketokohan. Kedua, Jaringan Birokrasi. Ketiga, Jaringan Keluarga dan keempat, Jaringan swasta/pengusaha. Keempat jaringan ini dilaksanakan secara bersama-sama dan terpadu sehingga Salmawati Jamado mampu meraih suara tertinggi diantara caleg PPP lainnya dan mengantarkannya menjadi Ketua DPRD Kabupaten Majene 2019-2024.

Kata kunci: *Strategi Partai Politik, Calon legislatif, Pemilu, Kab. Majene.*





## ABSTRACT

**Saharuddin. E052201003. The Strategy of the United Development Party (PPP) in Winning the 2019 Majene Regency Legislative Election. (Efforts of PPP Candidate Salmawati Jamado in winning votes in the 2019 Majene Regency Legislative Election). ( Supervised by Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si and Dr. Ariana Yunus, S. IP., M.Si).**

This study aims to analyze the Strategy of the United Development Party (PPP) in winning the Legislative Election and to analyze the efforts made by the PPP candidate Salmawati Jamado in winning votes in the Majene Regency Legislative Election, as well as to analyze the obstacles faced by the United Development Party in winning the 2019 Majene Regency Legislative Election .

This study uses a qualitative approach by interviewing several informants combined with a study of journal literature and other scientific research. The data is then processed using political party theory analysis, political party institutionalization and political strategy

The results of the research show that the United Development Party succeeded in winning the 2019 Majene Regency Legislative Election thanks to an institutional strategy, a defensive strategy and an open strategy. PPP's victory, among others, was contributed by candidate Salmawati Jamado as the highest vote winner in the internal PPP party by utilizing the network through four targets, namely First, the Character Network. Second, Bureaucratic Network. Third, Family Network and fourth, Private/entrepreneur Network. These four networks were carried out jointly and in an integrated manner so that Salmawati Jamado was able to win the highest votes among other PPP candidates and lead her to become Chair of the Majene Regency DPRD for 2019-2024.

*Keywords: Political Party Strategy, Legislative Candidates, Elections, Kab. Majene.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PENGAJUAN .....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Manfaat Akademis .....	8
1.4.2. Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1. Defenisi Strategi. ....	9
2.2. Strategi Partai Politik.....	12
2.2.1. Strategi Kelembagaan.....	15
2.2.2. Strategi Defensif dan Opensif .....	16
2.3. Defenisi Partai Politik.....	24
2.4. Fungsi Partai Politik.....	27
2.5 Institusionalisasi Partai Politik.....	35
2.6. Penelitian Terdahulu .....	46
2.7. Kerangka Pikir .....	51

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
<b>3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>3.2. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>55</b>
<b>3.3. Sumber Data .....</b>	<b>56</b>
<b>3.4. Informan Penelitian. ....</b>	<b>57</b>
<b>3.5. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>57</b>
<b>3.6. Teknik analisis Data .....</b>	<b>59</b>
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
<b>4.1. Gambaran Umum Kabupaten Majene. ....</b>	<b>61</b>
4.1.1. Gambaran Administrasi Wilayah.....	61
4.1.2. Potensi Wilayah Kabupaten Majene. ....	62
<b>4.2. Sejarah dan Ideologi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ..</b>	<b>63</b>
4.2.1. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan. ....	65
4.2.2. Prinsip Perjuangan Partai Persatuan Pembangunan.....	66
4.2.3. Profil Salmawati Jamado.....	68
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
<b>5.1. Eksistensi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).....</b>	<b>74</b>
<b>5.2. Strategi PPP Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019. ....</b>	<b>86</b>
5.2.1 Strategi Kelembagaan.....	86
5.2.2. Strategi Defensif dan Opensif. ....	89
5.2.3 Pemanfaatan Jaringan Salmawati Jamado .....	95
5.2.4. Jaringan Ketokohan. ....	96
5.2.5. Jaringan Birokrasi. ....	104
5.2.6. Jaringan Keluarga.....	109
5.2.7. Jaringan Swasta / Pengusaha. ....	114
<b>5.3. Hambatan PPP Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif .....</b>	<b>116</b>
5.3.1. Sumber keuangan partai yang sangat terbatas. ....	123
5.3.2. Partai tidak memiliki kader unggulan yang diusung pada Pemilu Legislatif.....	130
<b>5.4. Implikasi Teori .....</b>	<b>141</b>

<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>148</b>
<b>6.1. Kesimpulan. ....</b>	<b>148</b>
<b>6.2. Saran.....</b>	<b>150</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>152</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>154</b>
<b>Lampiran. Dokumentasi Wawancara.....</b>	<b>154</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.</b> Daftar Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi pada Pemilu Legislatif Kabupaten Majene 2019.....	76
<b>Tabel 2.</b> Daftar Perolehan Suara Calon Legislatif Kabupaten Majene Pemilu 2019.....	78
<b>Tabel 3.</b> Daftar Peraih Suara Terbanyak Partai Peserta Pemilu Legislatif Kabupaten Majene 2019.....	79
<b>Tabel 4.</b> Daftar Peraih Kursi Calon Legislatif PPP Kabupaten Majene 2019.....	81

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.</b> Wawancara dengan Sulaiman (PNS) di Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.....	154
<b>Gambar 2.</b> Wawancara Dengan Muh. Ayyub, Tim Sukses Salmawati Jamado .....	154
<b>Gambar 3.</b> Wawancara Dengan Alimuddin, Pengusaha Majene.....	155
<b>Gambar 4.</b> Wawancara Dengan Mantan Ketua DPC PPP Kab. Majene.	155

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Demokrasi yang berlangsung dinegara kita saat ini mengalami bias dan menimbulkan dampak sistemik dari berbagai macam penyimpangan yang terjadi dan ini disebabkan oleh salah satunya adalah partai politik. Partai politik tidak mampu memainkan fungsi dan perannya secara optimal. Institusionalisasi partai politik berjalan kurang baik sehingga ini menjadi persoalan utama partai politik di Indonesia saat ini. Sistem pengelolaan dan manajemen internal partai politik pada umumnya berjalan kurang profesional dan demokratis. Dari hasil Lembaga Survey terpercaya Indo Barometer, dimana pada awal tahun 2017 melakukan survei terhadap 1.200 sampling di 34 provinsi di Indonesia menunjukkan angka *margin oferror* sekitar 3%, menyatakan bahwa ada sebanyak 51,3% masyarakat menilai partai politik buruk.

Meskipun demokrasi bukan satu-satunya tatanan yang sempurna untuk mengatur peri-kehidupun manusia, namun sejarah telah membuktikan, bahwa demokrasi merupakan model kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Oleh karenanya meskipun dalam berbagai dokumentasi negara ini tidak banyak ditemukan kata demokrasi, para pendiri negara

sejak zaman pergerakan berusaha keras menerapkan prinsip-prinsip negara demokrasi bagi Indonesia.

Proses demokrasi di Indonesia telah berubah secara fundamental dan menemukan jati dirinya kembali sejak memasuki zaman reformasi dimana demokrasi di Indonesia sudah sampai pada titik yang tidak mungkin lagi berpaling kembali kebelakang. Hambatan-hambatan yang terjadi pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kondisi politik sebuah bangsa, namun Indonesia bisa dikatakan sebagai negara yang sukses menuju demokrasi, meskipun dalam penerapannya masih tertatih-tatih. Pasang surut yang dilalui bangsa Indonesia dalam membangun demokrasi telah membuahkan hasil dan mendapat pengakuan internasional.

Berangkat dari apresiasi dunia luar terhadap demokrasi di Indonesia, namun masih perlu pembenahan dalam menuju demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang di bangun di Indonesia perlu adanya interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian maka partai politik menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah. Akan tetapi, sekarang partai politik tidak lagi mepedulikan kepentingan rakyat padahal kalau kita lihat partai politik adalah wadah aspirasi masyarakat untuk menuju demokrasi yang sebenarnya.

Tidak ada negara demokrasi tanpa Pemilihan Umum (Pemilu), sebab Pemilu merupakan instrumen penting dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Sesungguhnya, pemilu bukan saja sebagai



arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih pemimpinnya, akan tetapi juga sebagai arena untuk menilai dan menghukum para pemimpinnya yang tampil di hadapan rakyat. Akan tetapi pengalaman di berbagai tempat dan negara menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilu seringkali hanya berupa kegiatan prosedural politik belaka sehingga proses dan hasilnya menyimpang dari tujuan Pemilu sekaligus mencederai nilai-nilai demokrasi. Kenyataan tersebut mengharuskan dilakukannya usaha yang tiada henti dalam membangun dan memperbaiki sistem Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, yakni Pemilu yang mampu menjaga kebebasan rakyat dan sekaligus menjaga kedaulatan rakyat.

Di negara yang sudah maju seperti di negara barat, persaingan dalam memperoleh suara pada pemilihan umum dianggap sebagai alternatif yang baik dalam menentukan figur seorang pemimpin politik yang mempunyai tanggung jawab terhadap pemilihnya. Dalam hal ini partai politik dan seorang calon legislatif maupun calon Presidennya tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut berbeda dengan kondisi yang terjadi di Indonesia dimana rakyat justru apatis terhadap partai dan para calonnya.

Keapatisan masyarakat terjadi karena baik partai maupun caleg dan capresnya dinilai tidak sungguh-sungguh bekerja untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya, para caleg dan aktor-aktor politik lebih banyak mementingkan pribadi dan partainya. Yang sangat disayangkan adalah apabila turunnya tingkat kepercayaan masyarakat melihat kondisi

politik yang ada, hingga terjadi krisis kepercayaan yang tinggi membuat apatisme masyarakat semakin terimplementasi dengan tidak ikut memilih pada pemilu atau lebih memilih golput, hal tersebut sangat tidak menguntungkan bagi perjalanan demokrasi bangsa kita.

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik secara konstitusional bagi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sedangkan pemilu adalah arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih dan menyeleksi para pemimpinnya. Akan tetapi partai politik sebagai mesin politik yang efektif, harus dapat memahami selera publik terutama terkait dengan penentuan calon legislatif dalam strateginya untuk menghadapi Pemilu jika tidak ingin partai politik akan ditinggalkan publik.

Kehadiran partai politik dalam pembangunan demokrasi modern saat ini sangat penting untuk dikaji, bagaimana kinerja partai politik dapat diandalkan sebagai pilar demokrasi. Dalam demokrasi modern diperlukan penerapan manajemen strategi partai politik karena setiap langkah yang dilakukan partai politik saat ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah baik di internal maupun di eksternal partai.

Dalam sudut pandang politik, tugas pemerintah, bekerja mengatur semua kepentingan pelaku politik yang terlibat dalam partai tersebut, akan tetapi bukan bertujuan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok atau partai politik tertentu. Adanya pembatasan kekuasaan sangat diperlukan agar dapat tumbuh kepercayaan anggota partai terhadap

pemegang kekuasaan dan agar tercipta keadilan serta kenyamanan dalam kehidupan berpolitik. Salah satu penanda agar tetap *survive*-nya partai politik dalam perawatan serta peningkatan negara demokrasi adalah kehadirannya senantiasa diketahui dan dirasakan oleh masyarakat sekitar di mana partai politik itu berada. Oleh karena itu, partai politik dapat menjadi lembaga demokrasi harapan dan kepercayaan masyarakat atau *democratic institutions hope and trust of the people*, dimana setiap saat partai politik bagi masyarakat tidak hanya sebagai institusi kekuasaan tetapi juga menjadi salah satu sumber informasi dan pengetahuan tentang perkembangan dunia politik.

Penelitian ini akan menyoroti proses pemilu legislatif yang berlangsung di Kabupaten Majene tahun 2019, dimana hasil pemilu menempatkan PPP sebagai peraih suara terbanyak diantara partai peserta pemilu. Khususnya diinternal partai dimana salah satu caleg PPP yakni Salmawati Jamado memperoleh suara terbanyak diantara caleg PPP lainnya yang diusung dalam pemilu tersebut. Salmawati Jamado yang notabene sebagai adik ipar Bupati, kehadirannya memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kemenangan suara partai yang jika ditelusuri lebih jauh, hal ini sangat berhubungan erat dengan pemegang kekuasaan dimana dalam waktu yang bersamaan Fahmi Massiara menjabat sebagai Bupati Majene.

Pemilu Legislatif yang berlangsung di Kabupaten Majene tahun 2019 yang menempatkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai

peraih suara terbanyak, juga sangat berkaitan dengan strategi politik yang dijalankan partai. Salah satu strategi yang berhasil diterapkan adalah menggunakan pendekatan kelembagaan dimana menjelang akhir masa jabatannya sebagai bupati Majene, Fahmi Massiara direkrut kedalam partai PPP menjadi pengurus partai yang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sulawesi Barat.

Sebagai Ketua DPW PPP Fahmi Massiara memiliki tugas dan tanggungjawab dalam memenangkan suara PPP di Sulawesi Barat, khususnya pemilu legislatif di Kabupaten Majene. Dengan posisinya yang sangat strategis di partai, dan dalam waktu yang bersamaan didukung oleh jabatannya sebagai Bupati Majene terbukti dikemudian hari dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam memenangkan pemilu legislatif kabupaten Majene.

Bagi penulis, penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena sudah terbukti di beberapa daerah di Indonesia, baik pileg atau pilkada dimana pemilu yang dilaksanakan pada umumnya dimenangkan oleh caleg atau calon kepala daerah yang diusung dari kalangan keluarga bupati/walikota atau gubernur, padahal pemilu legislatif di Kabupaten Majene tahun 2019 selain Salmawati Jamado yang menjadi calon PPP dari keluarga bupati Fahmi Massiara, juga kakak kandung bupati yakni Farid Massiara yang menjadi calon legislatif pada partai yang sama dan juga dapil yang sama, padahal jika kita berdasar pada teori pengaruh

kekuasaan, maka seharusnya Farid Massiaralah yang akan mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Majene karena lebih dekat secara hubungan darah dengan Bupati Fahmi Massiara, namun justru memperoleh suara lebih sedikit bahkan tidak mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Majene.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenangkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene tahun 2019.
2. Bagaimana upaya caleg Salmawati Jamado dalam meraih suara pada Pemilu Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019.
3. Apa hambatan yang dihadapi Partai Persatuan Pembangunan dalam memenangkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene tahun 2019.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis strategi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam memenangkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene tahun 2019.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan caleg Salmawati Jamado dalam meraih suara pada Pemilu Legislatif Kabupaten Majene Tahun 2019.

3. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi Partai Persatuan Pembangunan dalam memenangkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene 2019.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana dirumuskan diatas maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Akademis**

Secara umum temuan penelitian ini diharapkan dapat :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat memberi wawasan baru bagi dunia penelitian khususnya di bidang politik.
2. Memperkaya hasil penelitian khususnya yang berkaitan dengan strategi partai politik dalam kaitannya dengan praktek-praktek perpolitikan di Indonesia.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Dapat dijadikan rujukan bagi parpol lain dalam mengevaluasi hasil-hasil pemilu legislatif dan menjadi referensi bagi partai lain dalam menerapkan strategi memenangkan suara partai pada pemilihan legislatif selanjutnya.
2. Dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dan dalam pengembangan dibidang-bidang penelitian lainnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Defenisi Strategi.**

Strategi berasal dari kata Yunani *strategia* yang berarti ilmu perang atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, maka strategi adalah suatu seni merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara mengatur posisi atau siasat berperang angkatan darat atau laut. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur suatu kejadian atau peristiwa. (Iskandarwassid, 2008).

Strategi juga dapat didefinisikan dalam dua perspektif yang berbeda. Perspektif *pertama* mengenai apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi. Dalam perspektif ini strategi adalah program yang luas untuk mendefinisikan dan mencapai tujuan organisasi serta melaksanakan misinya (James Stoner, 1996). Kata program dalam definisi ini menyiratkan adanya peran yang aktif, rasional dan dimainkan oleh pemimpin dalam merumuskan strategi organisasi. *Kedua*, strategi adalah pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Dalam strategi ini, setiap organisasi mempunyai strategi, walaupun tidak harus selalu efektif, sekalipun strategi itu tidak dirumuskan secara eksplisit. Sasaran organisasi (*organization goals*) merupakan komponen vital yang perlu diteliti dalam penyusunan strategi sebuah organisasi. Strategi memiliki berbagai ciri-ciri yang mendasari dijalankannya sebuah strategi oleh sebuah organisasi. Menurut Hayes

dalam *James Stoner*, (1996) menyebutkan ciri-ciri strategi dirumuskan sebagai berikut:

- a. Wawasan waktu, strategi pada umumnya dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi cakrawala waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan jangka waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.
- b. Dampak, hasil akhir dari suatu strategi tidak langsung terlihat untuk jangka waktu yang lama, namun dampak akhirnya akan sangat berarti.
- c. Pemusatan upaya, strategi yang efektif biasanya mengharuskan pemusatan kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang sasaran yang sempit.
- d. Pola keputusan, strategi mensyaratkan bahwa berbagai keputusan harus diambil sepanjang waktu dan keputusan itu harus saling menunjang artinya mengikuti pola yang konsisten.
- e. Peresapan, sebuah strategi mencakup suatu spectrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan operasi harian. Selain itu, adanya konsistensi sepanjang waktu dalam kegiatan-kegiatan ini mengharuskan semua tingkatan dalam organisasi bertindak.

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan



suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. (Arifin, 2011).

Toni Andrianus, mengatakan bahwa strategi adalah rencana untuk tindakan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Sejalan dengan pemikiran *Carl Vob Clausewitz* dalam buku Toni Andrianus, dkk. Mengatakan bahwa perbedaan antara taktik dan strategi dimana taktik adalah seni menggunakan kekuatan bersenjata dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian. sedangkan strategi adalah rencana untuk tindakan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Lebih lanjut *Carl Von Clausewitz* berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan memenangkan kelanjutan dari politik. (Andrianus dkk, 2006).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Strategi dalam pengajaran bahasa merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Menurut *Hornby* mengemukakan bahwa strategi adalah kiat merancang operasi di dalam peperangan, seperti cara mengatur.

Setiap orang, organisasi, perusahaan bahkan pemimpin negara pasti mempunyai berbagai macam strategi untuk mempermudah

mencapai target yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus terdapat koordinasi tim yang baik pula, dengan kualitas tim yang baik maka pelaksanaan strategi yang telah disusun akan lebih efisien dan efektif yang nantinya dapat dicapai hasil yang maksimal.

Penulis berpendapat bahwa strategi adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam merumuskan suatu hal agar diperoleh tujuan secara tepat maka perlunya sebuah strategi. Dari sini penulis berasumsi bahwa partai politik memerlukan strategi yang tepat. Strategi yang tepat dapat memberikan dampak yang sangat signifikan, yaitu masyarakat menjadi sadar dalam memberikan pilihan kepada partai politik atau calon pemimpin yang benar dan tulus sesuai hati nurani mereka.

## **2.2. Strategi Partai Politik.**

Menurut *Peter Schorder* strategi politik yaitu strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. (Alif, 2019). Pada dasarnya, strategi politik adalah strategi kampanye politik untuk membentuk serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih menjadi orientasi perilaku yang akan mengarahkan pemilih untuk memilih partai politik atau kontestan tertentu. Jadi, strategi partai sangat penting untuk menghadapi kontestasi politik di waktu yang akan datang.

Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan

politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Strategi politik dengan melakukan pendekatan dan komunikasi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pemilu. Para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. Identifikasi ini perlu dilakukan untuk menganalisis kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh pada saat pencoblosan, juga untuk mengidentifikasi strategi pendekatan yang diperlukan terhadap masing-masing kelompok pemilih. Strategi ini perlu dipikirkan oleh setiap kontestan karena pesaing juga secara intens melakukan upaya-upaya untuk memenangkan persaingan politik.

Menurut *Clausewitz* dalam Nursal, (2004), strategi adalah pemahaman tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Pada abad modern, penggunaan kata strategi tidak lagi sebatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah dipraktekkan secara luas dalam semua bidang ilmu. Dalam ilmu umum, strategi ialah langkah agar memperoleh kemenangan atau pencapaian tujuan. Sehingga strategi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan-tujuan politik.

Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa strategi politik merupakan sebuah rencana yang tersusun dan mempraktekkannya dalam mencapai tujuan memenangkan kekuasaan dalam bidang politik. Dengan strategi politik inilah partai politik mampu memenangkan perebutan kekuasaan dalam setiap momentum pemilihan umum.

Strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau tehnik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik. Tanpa adanya strategi politik perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Bagi setiap Partai Politik strategi dalam mengikuti atau memenangkan Pemilihan Umum adalah sesuatu hal yang harus dimiliki. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada perinsipnya adalah kehidupan berorganisasi timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani. (Muchamad, 2011).

Menurut *Peter Schorder* strategi politik yaitu merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. (Alif, 2019),

Untuk dapat menentukan pilihan yang diinginkan, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui pola dasar strategi yang dibutuhkan. Berikut beberapa jenis-jenis strateginya:

### **2.2.1. Strategi Kelembagaan**

Strategi ini yang pada dasarnya memanfaatkan tokoh-tokoh politik baik mempertahankan tokoh di partai maupun merekrut tokoh atau figur baru ke dalam partai untuk dapat lebih memperkokoh kelembagaan. Artinya ketokohan seseorang politikus atau pejabat publik di masyarakat yang bergabung dalam partai maka akan dapat memperkuat posisi lembaga politik. Seseorang pejabat publik atau ketokohnya di masyarakat yang ditempatkan dalam struktur kepengurusan partai politik akan memiliki pengaruh tersendiri pada lembaga politik tersebut. Nama seorang politikus yang duduk dalam kepengurusan lembaga politik atau sekaligus diusung sebagai caleg atau kandidat pilkada akan berdampak baik terhadap keberlangsungan partai. Begitu pula sebaliknya lembaga politik yang baik yang memiliki visi misi yang jelas dan terarah maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh politik masuk kedalam partai tersebut.

## 2.2.2. Strategi Defensif dan Offensif

### a. Strategi Defensif.

Strategi defensif yaitu strategi yang diperlukan jika partai politik atau koalisi parpol pendukung pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan posisinya atau eksistensinya dimasyarakat. Strategi defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan basis konstituen (pemilih tradisionalnya) dan sekaligus membendung pengaruh politik dari partai lain. Strategi defensif akan muncul kepermukaan, salah satunya apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya apabila *potential constituent* (pemilih potensial) ingin dipertahankan. Jadi dengan demikian strategi *deffensive* digunakan apabila partai politik ingin mempertahankan mayoritas suara pemilih. Strategi Defensif terdiri dari strategi mempertahankan pasar dan strategi melepas atau menyerahkan pasar. Strategi mempertahankan pasar merupakan cara partai politik dalam menjaga mayoritas pemilihnya. Partai politik mempertahankan pendukung dengan cara memberikan sosialisasi kepada para pemilih musiman, agar mereka menjadi pemilih tetap pada partai politik tersebut pada pemilu. Strategi partai politik dalam menjaga dan merawat pemilihnya dilakukan dengan cara membuat produk baru yang berbeda dari partai politik lainnya. Dalam merawat konstituennya, partai politik harus berusaha mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Sedangkan strategi melepas atau menyerahkan pasar diartikan sebagai tindakan dari partai politik yang ingin menyerah dengan keadaan. Dalam arti lain partai politik mengalami keadaan ingin berkoalisi dengan partai lain, selain itu pada pemilu yang melakukan pemungutan suara putaran kedua, biasanya hal ini diikuti oleh kandidat-kandidat yang kuat dalam pemilu putaran pertama, penyerahan pasar untuk sementara diberikan kepada pihak ketiga. Strategi politik perlu dilakukan oleh para kontestan untuk dapat memenangkan pilkada maupun pemilu legislatif, para kontestan perlu melakukan kajian untuk mengidentifikasi besaran pendukungnya, massa mengambang dan pendukung kontestan lainnya. (Firmanzah, 2008)

Menurut Firmanzah strategi *pertama* adalah pengenalan atau sosialisasi bakal calon. Perlu ditekankan untuk menggaet pemilih adalah dengan *problem solving*, memberikan solusi-solusi nyata terhadap permasalahan di suatu daerah. Masyarakat akan melihat suatu gagasan, *track record* yang dimiliki oleh calon.

*Kedua* adalah pendekatan, untuk mendapatkan dukungan partai politik. Menyamakan ideologi terhadap beberapa partai, atau mendekati pemilih yang partai berideologi sama, seperti kesamaan agama, organisasi, ataupun suku dan ras.

*Ketiga* adalah Komunikasi, menanamkan keyakinan terhadap pemilih (kampanye). Kontestan politik perlu melihat karakteristik pemilihnya, apabila pemilih lebih melihat aspek rasional, proses keyakinan

dilakukan secara argumentatif dan dilandaskan pada penyediaan data dan informasi yang dipercaya. Aspek berpikir logis yang bersifat *problem solving* perlu dikomunikasikan kepada pemilih.

*Keempat* adalah penguatan atau komitmen, dibutuhkan dalam hubungan antara pendukung kontestan. Sangat diharapkan ikatan antara partai politik dengan konstituen menjadi semakin tinggi.

Disamping itu partai politik juga perlu melakukan strategi pemetaan karakteristik pemilih, karena di masyarakat terdapat kelompok masyarakat yang lebih menggunakan logika dan rasionalitas dalam menentukan pilihan terhadap kontestan. Kemampuan partai politik dalam memecahkan persoalan masyarakat menjadi titik perhatian kelompok masyarakat ini. Namun banyak juga kelompok masyarakat yang memilih karena memiliki kedekatan ideologis. Mereka memperdulikan program apa yang ditawarkan oleh partai politik asalkan ideologi partai memiliki kesamaan dengan ideologi pemilih, maka hal tersebut cukup beralasan untuk mencoblosnya. (Firmanzah, 2007).

Partai politik dalam melakukan komunikasi politik dengan masyarakat khususnya konstituen juga menggunakan strategi kampanye diantaranya yang biasa dikenal dalam dunia bisnis dengan istilah *direct selling* dan juga kampanye secara *door to door*. *Direct selling* dengan pendekatan *door to door* merupakan teknik jitu pendekatan personal agar orang lain mendukung partai dan capres pilihan yang diusung dalam pemilu (Satria Hadi Lubis dan Kingkin Anida, 2008).



Strategi dalam politik adalah suatu mekanisme bagaimana seseorang ataupun kelompok dengan ide politik yang dipahaminya, mampu memenangkan suatu pertarungan politik disaat banyak orang yang berkepentingan menghendaki hal yang sama, ide politik tentu saja akan menciptakan perbedaan antar masyarakat yang menjadi pendukung ide tersebut, dan dalam setiap keadaan pasti ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan karena hasil dari satu keputusan politik akan melahirkan perubahan ataupun kondisi yang sama disaat status quo yang memenangkan pertarungan itu, oleh karena itu setiap ide/pemikiran pasti memiliki pendukung dan penentang. (Marijan, 2010).

#### **b. Strategi Offensif.**

Strategi offensif yaitu strategi yang dibutuhkan jika suatu partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, atau jika seorang eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek yang ingin ia bangun. Bagi *Schoder*, strategi offensif selalu dibutuhkan misalnya apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau apabila pihak eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Dalam kedua kasus tersebut harus lebih banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai atau proyek tersebut, sehingga kampanye tersebut berhasil. Ada dua strategi dalam Strategi offensif. Pertama strategi memperluas pasar dan kedua strategi menembus pasar.

Strategi perluasan pasar digunakan dalam kampanye pemilu dan penerapan kebijakan. Dalam perluasan pasar perlu dilakukan pembaruan

produk, produk yang lama belum berhasil dijalankan dengan baik, maka itulah yang harus dilakukan pembaruan agar menghasilkan produk baru yang lebih baik, produk baru yang dimaksud disini adalah kebijakan baru yang dihasilkan. Bagi partai sendiri, persyaratan-persyaratan berikut harus dipenuhi dan konsekuensinya harus dipertimbangkan :

- a. Platform partai harus memiliki ciri khas sendiri.
- b. Menciptakan profil baru yang dapat diterima oleh masyarakat.
- c. Kader partai harus menampilkan keselarasan dengan program yang dicetuskan.

Dalam melaksanakan strategi politik, perluasan pasar sangatlah penting dilakukan. Dalam strategi perluasan pasar hal yang terpenting ialah bagaimana target yang dituju mampu mengerti dengan produk yang ditawarkan dan mengetahui keuntungan-keuntungannya. Maka dari itu dalam menjalankan strategi menembus pasar, partai politik harus paham mengenai keadaan pasar itu seperti apa.

Strategi menembus pasar merupakan strategi yang digunakan untuk melakukan pemetaan terhadap keadaan pemilih di daerah tersebut. Setelah mengetahui keadaan pemilih, maka dilihat juga program diberikan lawan yang sebelumnya telah berhasil dalam melakukan strategi tersebut. Strategi ini dipergunakan untuk mendobrak suara-suara pemilih yang diperebutkan bersama dengan caleg-caleg dari partai lain. Dengan demikian maka upaya yang ditempuh adalah melakukan kunjungan-kunjungan secara berkala pada daerah-daerah basis massa yang

mengambang secara intensif dengan mengadakan sosialisasi-sosialisasi partai.

Berkaitan dengan strategi defensif dan ofensif diatas maka upaya kandidat atau caleg dalam meraih suara pada pemilu baik pemilu eksekutif maupun legislatif, partai menempuh berbagai jalur strategi, antara lain adalah sebagai berikut :

### **1. Jalur Ketokohan.**

Jalur ketokohan yang dimaksudkan disini dalam upaya partai dalam meraih suara pada pemilihan kepala daerah atau pemilihan legislatif dengan cara mengadakan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, tokoh keagamaan, kepala desa/lurah atau kepala lingkungan dan sebagainya yang selanjutnya tokoh-tokoh tersebut juga berusaha mempengaruhi komunitas kelompoknya agar memilih pasangan kepala daerah atau calon legislatif tertentu.

Ketokohan seseorang memiliki peran yang besar dalam mendapatkan dukungan suara karena kebanyakan masyarakat melihat ketika pemimpinnya atau tokohnya memihak kepada pasangan calon atau caleg tertentu maka anggota kelompoknya juga akan ikut mendukung atau memilih calon tersebut. Namun demikian, tidak selamanya dan tidak semuanya mengikut kepada tokohnya atau pemimpinnya karena terkadang dalam hal ini keputusan seseorang untuk memilih adalah hak individu yang bersangkutan dan kadang-kadang keputusannya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti hubungan keluarga dengan calon,

hubungan bisnis, posisi jabatan di birokrasi, dan berbagai kepentingan lainnya. Sehingga akan sulit rasanya tokoh tersebut mempengaruhi bawahannya untuk memilih sebagaimana pilihannya

## **2. Jalur Birokrasi.**

Strategi partai lainnya yang sering ditempuh dalam meraih suara pada pemilu baik pemilu legislatif maupun eksekutif adalah melalui jalur birokrasi. Kepala Daerah yang akan maju menjadi calon eksekutif berusaha membangun hubungan atau pendekatan kepada para PNS dan birokrat . Ketika berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah maka para birokrat atau PNS lainnya yang telah mendukungnya dalam pemilu akan berupaya mengadakan pendekatan kembali kepada kepala daerah terpilih agar dapat diberikan jabatan dalam birokrasi dan pemerintahan.

Sistem pemilihan langsung di negara kita saat ini yang menggunakan sistim proporsional terbuka menyebabkan semua caleg yang ikut dalam pemilu saling bersaing dalam memperebutkan suara agar dapat memperoleh kursi di legislatif. Namun jika ditelusuri lebih jauh meskipun semua caleg yang ingin duduk sebagai wakil rakyat di legislatif harus di dukung dengan modal yang cukup untuk memudahkan dalam memperoleh suara, namun demikian tidaklah selamanya modal berupa uang yang akan membawanya masuk ke dalam kursi legislatif akan tetapi sebagai transaksi dalam pemilu bisa juga berupa iming-iming jabatan bagi pejabat atau PNS yang mendukungnya. Dan sudah terbukti selama ini di beberapa daerah dimana pejabat atau PNS yang terbukti tidak

memilih calon kepala daerah terpilih akan menyebabkan jabatannya menjadi menurun bahkan hilang sama sekali atau bisa berakibat PNS dimutasi ke daerah lain.

### **3. Jalur Keluarga.**

Upaya lain yang ditempuh pasangan calon kepala daerah atau calon legislatif dalam mendapatkan dukungan suara pada pemilu adalah melalui jalur keluarga. Seorang caleg atau kandidat kepala daerah yang memiliki jaringan keluarga yang banyak, baik keluarga yang terdekat maupun keluarga yang jauh dan memiliki hubungan ikatan keluarga yang baik dan terjaga maka akan memudahkan caleg dalam mendapatkan suara yang banyak. Sebaliknya meskipun memiliki jaringan keluarga yang banyak dan luas akan tetapi hubungannya tidak terjaga dan terpelihara dengan baik maka otomatis akan berpengaruh pula terhadap perolehan suara dalam pemilu.

Hal yang banyak dijumpai dalam pilukada atau pemilu legislatif ketika ada pihak keluarga yang tidak memberikan dukungannya maka antara kandidat atau caleg yang bersangkutan dengan pihak keluarganya yang terkadang menimbulkan hubungan yang renggang pasca pilukada berakhir. Dari sinilah seorang kandidat kepala daerah atau calon legislatif dituntut untuk dapat memiliki sikap dan kepribadian yang baik dimasyarakat jika ingin mencalonkan diri dalam pemilu di daerahnya, karena seorang calon yang ikut dalam pemilu sikap dan kepribadian calon

yang diutamakan agar dapat memperoleh dukungan dari masyarakat terutama dari kalangan keluarganya.

#### **4. Jalur Swasta.**

Selain ketiga jalur sasaran yang dipergunakan calon pemilukada dan calon legislatif yang telah disebutkan diatas maka jalur swasta juga merupakan sasaran yang juga sering dijadikan lahan untuk mendapatkan suara dalam pemilu. Jalur-jalur swasta yang dimaksudkan disini antara lain meliputi kelompok-kelompok pengusaha, kontraktor, organisasi kepemudaan, BUMN dan BUMD, dan organisasi swasta lainnya.

#### **2.3. Defenisi Partai Politik.**

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik. Sedangkan dalam arti sempit, partai adalah partai politik, yaitu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik. (Ali, 2011)

Di dalam undang- undang nomor 2 tahun 2011 sudah dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Mushab, 2016).

Menurut Miriam Budiardjo, Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. (Mushab, 2016).

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pembangunan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab ditelinga masyarakat dan di lingkungan kita dimana partai sebagai sebuah lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah tersendiri dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara. Dan keberadaannya muncul ketika negara itu telah memasuki fase negara modern.. (Budiardjo, 2008)

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi. Mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. (Budiardjo, 2008)

Partai politik didirikan dengan tujuan untuk: 1) mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Sebastian, 2007).

Partai politik adalah salah satu bentuk pengelompokan warga negara berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik. Partai Politik sebagai organisasi yang terstruktur baru muncul pada 1830 an sebagai wujud perkembangan demokrasi, yaitu demokrasi perwakilan. Perkembangan demokrasi telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bernegara. Sarana kelembagaan terpenting yang dimiliki untuk mengorganisasi perluasan peran serta politik tersebut adalah partai politik. (Samuel, 2003)

Partai politik merupakan sebuah lembaga yang mempengaruhi negara dengan cara menguasai jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Biasanya, partai politik mempunyai lebih dari sekedar satu kepentingan dan mencoba memperjuangkan kepentingan tersebut.

Sejalan dengan itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 adalah organisasi yang bersifat nasional



dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan partai politik setidaknya paling sedikit terdiri dari 50 orang WNI yang telah berusia 21 tahun dengan akta notaris. Pendirian dan pembentukannya menyertakan 30% keterwakilan perempuan. ( Hamdi, 2013).

#### **2.4. Fungsi Partai Politik.**

Fungsi partai politik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 pasal 12 (Cangara, 2011). Fungsi partai politik yakni menjadi sarana untuk:

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia.

- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Secara umum fungsi utama partai politik dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Agregasi dan artikulasi kepentingan

Adalah kegiatan partai politik untuk mengumpulkan atau menghimpun kepentingan-kepentingan yang berkembang maupun yang tersembunyi didalam masyarakat. Selanjutnya kepentingan tersebut diperjuangkan oleh parpol melalui lembaga legislatif. Sebagai upaya mengartikulasikan kepentingan (interest articulation) atau political interest yang terdapat atau terkadang tersembunyi dalam masyarakat, berbagai kepentingan tersebut diserap sebaik-baiknya oleh parpol menjadi ide, visi, dan kebijakan parpol. Setelah itu ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan diadvokasikan sehingga diharapkan dapat mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Semakin tepat penafsiran terhadap kepentingan masyarakat semakin besar parpol tersebut mendapat dukungan dalam pemilu. Sebaliknya jika gagal atau salah dalam menafsirkan kepentingan masyarakat maka yang muncul adalah antipati terhadap parpol yang bersangkutan.

2. Pendidikan politik

Yaitu bahwa partai politik harus memberikan pemahaman kepada para anggota dan masyarakat luas tentang cara-cara berdemokrasi dan

menjadi pemimpin yang baik dengan memberikan contoh kepemimpinan yang baik kepada kader-kader dan masyarakat luas. Pendidikan politik juga menanamkan nasionalisme kepada bangsa dan negara, kesetiaan terhadap parpol adalah bagian dari penguatan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Terkait dengan komunikasi politik, parpol berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (political socialization) sekaligus pendidikan politik. Karena partai berfungsi sebagai struktur antara yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.

### 3. Kaderisasi.

Kaderisasi adalah fungsi yang terabaikan semenjak awal kehidupan parpol sampai sekarang. Pada masa lalu kaderisasi dilakukan oleh bukan parpol, tetapi oleh ormas-ormas yang menjadi underbouw partai dan pimpinan parpol tinggal menerima kader-kader yang dihasil ormas. Pada masa demokrasi sekarang ini pimpinan parpol seharusnya melakukan pendidikan kader secara berjenjang dan berkesinambungan untuk menghasilkan kader-kader parpol yang akan menjadi pimpinan nasional dimasa depan. Kelangkaan kaderisasi akan merugikan parpol sendiri karena parpol tersebut tidak memiliki kader yang memahami platform partai, sejarah perjuangan partai, dan strategi politik yang digunakan oleh partai. Sehingga mudah goyah dalam memperjuangkan partai karena lemahnya kesetiaan dan sense of belonging terhadap parpol.

#### 4. Rekrutmen

Merupakan fungsi yang penting, parpol diharapkan melakukan fungsi rekrutmen yang baik, yakni menempatkan kader-kader pada jabatan-jabatan didalam partai dan jabatan-jabatan politik diluar partai (lembaga eksekutif dan legislatif) berdasarkan kemampuan, kinerja, dan pengalaman kader yang bersangkutan. Rekrutmen yang buruk adalah rekrutmen yang didasarkan pada KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Akibatnya citra parpol juga akan terpuruk dimata masyarakat karena kinerja dan prestasi yang buruk akibat kesalahan rekrutmen (Sebastian Salang, 2007, hlm. 11).

Melalui rekrutmen politik, partai politik kemudian dituntut dapat menciptakan sistem seleksi internal yang jelas, terbuka, dan responsif atas aspirasi politik. Selain itu, pada aspek personal caleg optimalisasi semestinya dapat dilakukan dengan menuntut para caleg untuk tampil berintegritas dengan aktif membangun basis massa di daerahnya. Pemilu yang terselenggara kemudian menjadi momentum uji kandidasi tersebut. Melalui pemilu proses seleksi kandidat yang akan menimbulkan rasa keterwakilan politik karena wakil yang terpilih disaring oleh pemilih. Dengan begitu, wakil yang dipilih benar-benar memiliki legitimasi yang kuat bagi konstituen dan juga partainya.

Demokrasi memang menghendaki proses yang terus berkelanjutan. Setelah terpilih, orang tidak hanya menilai atas janji kampanye yang mereka katakan tapi pemilih juga menilai bahwa calon terpilih benar-benar

bekerja dan membuat formulasi kebijakan yang dapat mempengaruhi kondisi masyarakat. Untuk itu, proses komunikasi secara keberlanjutan yang dilakukan oleh para caleg semestinya dapat memangkas potensi kesenjangan retorika kampanye dengan realitas yang nantinya terjadi.

Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan partai politik yang kini tengah meninggi tentunya dapat menjadi bahan evaluasi strategis yang penting dalam proses pemilu legislatif di tahun depan.

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau setidaknya atas persetujuan rakyat karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna. Partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi pemilihan tersebut benar-benar bermakna.

Di negara demokrasi partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya,

tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Berikut ini diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di negara-negara demokratis, otoriter, dan negara-negara berkembang yang berada dalam transisi ke arah demokrasi.

Berikut ini fungsi partai politik di negara Demokrasi :

#### 1. Sebagai Sarana Komunikasi Politik.

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan. (Budiardjo, 2008).

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasi, niscaya pendapat atau aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai (*goal formulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan

kebijakan umum (*public policy*). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

## 2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik.

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa. (Budiardjo, 2008).

## 3. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *onderbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon- calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain. (Budiardjo, 2008).

#### 4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian di antara mereka



dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya. (Budiardjo, 2008).

Di samping itu, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan dengan diarahkan pada dua hal utama (Penjelasan Umum UU 2/2011) yaitu :

- a. Membentuk sikap dan perilaku partai politik yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku partai politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat.
- b. Memaksimalkan fungsi partai politik baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik.

## **2.5 Institusionalisasi Partai Politik.**

Menurut pendapat *Robert MZ. Lawang* dalam wikipedia bahwa Institusionalisasi adalah proses terbentuknya pranata sosial atau yang kita kenal juga dengan institusi. Selanjutnya menurut pendapat Soejono Soekanto, Institusionalisasi adalah sebuah proses di mana suatu unsur ataupun Norma menjadi bagian dari suatu lembaga sehingga bisa

dikatakan bahwa unsur norma tersebut merupakan unsur dasar dari lembaga. Proses Institusionalisasi disebut juga dengan proses pelembagaan.

Proses Institusionalisasi ini merupakan serangkaian proses yang dilalui oleh suatu Norma dalam masyarakat yang kemudian menjadi salah satu lembaga sosial. Menurut Imansyah Pelembagaan partai politik adalah proses dalam pematapan sikap dan perilaku partai politik yang sistematis dan terpola dalam mendukung prinsip dasar demokrasi. (Ilmansyah, 2012)

Sebagai tuntutan organisasi yang modern partai politik dituntut untuk memiliki etika kepemimpinan yang demokratis dan kolegial, etika organisasi, dan etika pertanggungjawaban kepada masyarakat yang semuanya dilembagakan dalam mekanisme internal partai yang disepakati bersama. (Haris, 2016)

Institusionalisasi partai politik ialah proses pematapan dan pembenahan partai politik baik secara struktural dalam rangka mempolakan perilaku maupun secara kultural dalam upaya membentuk pola sikap atau budaya politik. Menurut Yoghi Pratama, ada 4 (empat) dimensi institusionalisasi kepartaian antara lain adalah:

1. Dimensi kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan structural.
2. Dimensi identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural.

3. Dimensi otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan.
4. Dimensi pengetahuan atau citra publik (*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.  
(Randall dan Svasand, 2002).

#### **a. Dimensi Kesisteman Parpol**

Yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politi, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik. Derajat kesisteman suatu partai bervariasi menurut Randall dan Svasand. (2002)

1. Asal-usul partai politik, yaitu apakah dibentuk dari atas, dari bawah, atau dari atas yang disambut dari bawah.
2. Siapakah yang lebih menentukan dalam partai: seorang pemimpin partai yang disegani atautkah pelaksanaan kedaulatan anggota menurut prosedur dan mekanisme yang ditetapkan oleh organisasi sebagai suatu kesatuan.
3. Siapakah yang menentukan dalam pembuatan keputusan: faksi- faksi dalam partai atautkah partai secara keseluruhan; dan
4. Bagaimana partai memelihara hubungan dengan anggota dan simpatisan, yaitu apakah dengan klientelisme (pertukaran dukungan

dengan pemberian materi) ataukah menurut konstitusi partai (AD/ART).

#### **b. Dimensi Identitas Nilai Partai Politik**

Identitas nilai (value infusion) ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, dan karena itu berdasarkan basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut.

Karena itu, derajat identitas nilai suatu partai politik berkaitan dengan : (1) Hubungan partai dengan kelompok populis tertentu (*popular bases*), yaitu apakah suatu partai politik mengandung dimensi sebagai gerakan sosial yang didukung oleh kelompok populis tertentu, seperti buruh, petani, kalangan masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu, komunitas kelompok etnik tertentu, dan (2). Pengaruh klientelisme dalam organisasi, yaitu apakah hubungan partai dengan anggota cenderung bersifat instrumental (anggota selalu mengharapkan tangible resources berupa materi dari partai) ataukah lebih bersifat ideologis (anggota mengenal dan mengharapkan partai bertindak berdasarkan identifikasi terhadap ideologi partai). Partai politik yang mempunyai basis sosial pendukung yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas.

#### **c. Dimensi Otonomi Partai Politik**

Derajat otonomi (decisional outonomy) suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah),

maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat) :

1. Apakah partai tergantung kepada aktor luar tersebut ataukah hubungan itu bersifat saling tergantung (interdependen), dan
2. Apakah keputusan partai ditentukan oleh aktor luar ataukah hubungan itu berupa jaringan (linkage) yang memberi dukungan kepada partai.

#### **d. Dimensi Reifikasi Partai Politik**

Derajat pengetahuan publik tentang partai politik merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut telah tertanam pada imajinasi publik, maka pihak lain baik para individu maupun lembaga akan menyesuaikan aspirasi dan harapan ataupun sikap dan perilaku mereka dengan keberadaan partai politik tersebut. Derajat pengetahuan publik ini merupakan fungsi dari waktu dan kiprah partai tersebut.

Pada dasarnya dalam sistem demokrasi keberadaan partai politik masih sangat dibutuhkan, ibarat partai politik adalah mesin daripada sistem demokrasi itu sendiri. Dengan demikian maka dibutuhkan suatu kerangka institusionalisasi partai politik sebagai acuan dalam menciptakan sistem politik yang lebih demokratis. Pertama, partai politik harus membangun kekuatan institusi yang demokratis, bukan membangun kekuatan ketokohan personal atau bintang politik. Apabila masih mengandalkan figur belaka, bila figur itu rusak, rusak juga seluruh institusi partai tersebut sehingga peran kaderisasi dalam partai politik sungguh

vital. Menghidupkan sistem rekrutmen internal yang terstruktur dan menggunakan sistem merit.

Partai politik memilih kader terbaik dari tingkat ranting, kecamatan untuk menjadi calon pemimpin yang akan diusung pada pemilu maupun pilkada ke depan. Kedua, partai politik harus memiliki integritas internal yang kuat. Dengan memiliki kekuatan internal yang memiliki integritas, kebijakan yang kemudian diterapkan keluar akan memiliki kualitas yang baik karena lahir dari sistem integritas internal yang baik. Ketiga, Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) harus mendukung partai politik untuk membentuk jadi dirinya sehingga partai tidak mengandalkan kekuatan uang (money politic) dan tawaran kekuasaan sebagai senjata utama meminta dukungan. Membentuk jadi diri parpol lambat laun dapat mengikis parpol yang hanya mengandalkan uang. Sistem partai politik ke depan yang bertahan adalah yang memiliki basis kekuatan organisasi yang baik. Selain itu, parpol seharusnya bisa memiliki kemampuan crowd funding, di mana parpol mampu melaksanakan kegiatan dengan melibatkan dana kader atau publik. Keempat, negara bisa hadir membiayai partai politik. Tujuannya agar partai bisa bekerja secara efisien tanpa terbebani oleh penyandang dana dari swasta. Namun demikian pendanaan parpol oleh APBN ini harus dipertanggungjawabkan dan harus terbuka kepada publik atas segala penggunaannya. Memberikan pendanaan kepada partai harus disesuaikan dengan budget kegiatan, bagaimana tiap partai mendapat hak pada saat yang sama sesuai

proporsi pemilunya, namun yang utama juga harus mau diaudit dan memiliki prestasi di lapangan.

Kerangka institusionalisasi partai politik di atas diharapkan menjadikan partai politik di Indonesia menjadi lebih profesional dan kembali dipercaya oleh masyarakat. Hidupnya mesin internal partai politik diharapkan kelak dapat melahirkan banyak politisi negarawan. Dengan begitu, pada suatu titik Indonesia akan menuju tahap akhir proses transisi demokratisasi dan sudah sepenuhnya menjadi negara demokrasi Pancasila seutuhnya. Lebih lanjut menurut Muhammad Qodari direktur eksekutif Indo Barometer dalam wikipedia tersebut menyebutkan masifnya ketidakpercayaan itu berdampak terhadap tingkat kedekatan masyarakat kepada partainya. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik antara lain disebabkan oleh : *Pertama*, perpecahan dan perebutan kekuasaan di internal partai menjadi tontonan publik di media massa. Contohnya saja dari 10 partai yang saat ini lolos *electoralthreshold* pada 2014, masih ada partai yang sampai saat ini dalam kondisi dualisme kepemimpinan. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk agenda politik kepentingan kelompoknya semata. *Kedua*, anggapan aktivis-aktivis partai politik koruptif. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir beberapa ketua parpol menjadi pesakitan di penjara. Selain itu, dalam isu korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) menjerat sebagian besar elite politik yang didakwa terlibat kasus tersebut. *Ketiga*,

sistem kaderisasi internal partai yang masih menggunakan patronase ketokohan semata.

Beberapa parpol yang saat ini memiliki perwakilan di parlemen misalnya ketua umumnya sudah beberapa periode tidak tergantikan, paling bergeser ke ketua Dewan Pembina. Artinya, regenerasi kaderisasi kepemimpinan di parpol tersebut tidak berjalan. Dan, bukan hanya satu-dua parpol, beberapa parpol di Indonesia mengandalkan figuritas ketokohan semata. *Keempat*, sistem internal parpol yang masih feodal yakni pucuk pimpinan partai di kuasai oleh keluarga. Contohnya ada parpol yang ketua umum bapaknya, lalu anaknya menjabat jadi ketua fraksi di parlemennya. Ada lagi ketua umum ibunya, anaknya menjadi menko di pemerintahan yang dipimpin. Artinya, parpol sejatinya merupakan wadah aspirasi masyarakat.

Namun, di Indonesia masih ada parpol yang masih menggunakan sistem feodal dalam internal partainya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Faktor utama yang menyebabkan adalah partai politik tidak mampu memainkan fungsinya secara optimal sebagai organisasi profesional. Institusi partai politik cenderung terjebak hanya mengejar kepentingan sendiri dan golongannya, kemudian melupakan keberadaan hakikinya dalam sistem politik. Karena itu, seluruh partai politik memerlukan institusionalisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dari partai tersebut. Hal ini diharapkan dapat menunjang kehadiran proses demokratis yang lebih baik di dalam institusinya.



Pembenahan institusi partai politik ini sejatinya merupakan aspek penting menuju transisi demokratisasi yang baik di Indonesia. Lantas, apakah institusionalisasi baru partai politik itu ? Menurut Huntington, institusionalisasi partai politik adalah sebuah proses pengorganisasian dan prosedur untuk mendapatkan *value* (nilai) dan *stability* (stabilitas) tertentu. Ketika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, partai politik tersebut dapat dikatakan telah terlembagakan dengan baik. Satu masalah serius yang dihadapi partai-partai di Indonesia saat ini adalah tidak ada institusionalisasi dalam tubuh partai secara menyeluruh. Partai seakan-akan hanya menjalankan aktivitasnya menjelang pemilu. Pada umumnya partai politik di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan belum melembaga menjadi sebuah organisasi yang moderen. Pelembagaan partai politik merupakan suatu proses pemantapan sikap dan perilaku pengurus partai politik yang terpola dalam suatu sistem sehingga terbentuk suatu budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Dalam konteks pembangunan politik, yang terpenting bukan banyaknya partai yang ada, akan tetapi sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. Sistem kepartaian kokoh dan adaptabel, apabila partai politik mampu menyerap dan menyatukan semua kekuatan sosial baru yang muncul sebagai akibat modernisasi. Dari sudut pandang ini, jumlah partai hanya akan menjadi penting bila ia mempengaruhi kapasitas sistem untuk

membentuk saluran-saluran kelembagaan yang diperlukan guna menampung partisipasi politik.

Sistem kepartaian yang kokoh sekurang-kurangnya harus memiliki dua kapasitas. Pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik anomik dan kekerasan. Kedua, mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem kepartaian dikatakan kuat apabila mampu mewujudkan organisasi partai yang mengakar dan melembaga guna mengasimilasikan kelompok baru ke dalam sistem politik.

Penguatan partai politik di Indonesia dapat dilakukan pada 3 level, yaitu: level akar rumput (grassroot), level pusat dan level pemerintahan. Pada level akar rumput partai dapat dimaknai partai dalam konteks lokal, partai lokal, para pendukung, serta masyarakat pemilih. Pada level pusat partai dihadapkan pada konteks nasional, partai politik lain, dan negara. Pada level pemerintahan partai menghadapi konteks dalam pemerintahan, fraksi-fraksi lain, komisi, dan negara. Penguatan partai politik pada level akar rumput merupakan ujung tombak partai, karena merekalah yang secara langsung bersentuhan dengan basis sosial partai dan masyarakat.

Pengelolaan partai politik ditingkat akar rumput ini pada akhirnya akan menentukan kuat atau lemahnya dukungan terhadap partai. Persoalan memelihara loyalitas pendukung menjadi problema tersendiri

bagi partai politik di tingkat akar rumput. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa peranan partai di akar rumput saat ini lebih banyak diambil oleh organisasi masyarakat sipil dan media massa. Demikian pula halnya penguatan partai juga harus dilakukan pada level partai di tingkat pusat. Partai politik di tingkat pusat diharapkan dapat menjadi payung aktivitas bagi semua kader, tetapi juga menjadi pendukung aktivitas para pekerja partai dan koordinator disemua level partai. Apa pun kebijakan yang diambil harus dikomunikasikan kepada partai pada level akar rumput dan pada partai di pemerintahan. Peran partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan kemudian ditransformasikan dalam berbagai kebijakan negara dengan mengedepankan kepentingan rakyat.

Pelebagaan partai-partai biasa dilakukan melalui penguatan 4 (empat) komponen kunci, yakni, pengakaran partai (party rooting), legitimasi partai (party legitimacy), aturan dan regulasi (rule and regulation), dan daya saing partai (competitiveness). Pengakaran partai dimaksudkan agar partai terikat secara organik dengan masyarakat, khususnya dengan konstituennya. Dengan ini partai dapat secara kontinyu menjalankan fungsi-fungsinya yang terhubung secara langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan politik, sosialisasi dan komunikasi politik dan juga agregasi kepentingan yang lebih luas. Selanjutnya, pelembagaan kepartaian bisa juga dilakukan dengan menata aturan dan regulasi (rule and regulation) dalam partai. Maksudnya adalah penguatan partai dengan menciptakan kejelasan struktur dan aturan kelembagaan dalam berbagai

aktivitas partai baik di pemerintahan, internal organisasi, maupun akar rumput. Dengan adanya aturan main yang jelas dan disepakati oleh sebagian besar anggota, dapat dicegah upaya untuk manipulasi oleh individu atau kelompok tertentu bagi kepentingan-kepentingan jangka pendek yang merusak partai. Kemudian, dalam perbaikan terhadap struktur dan aturan, dapat dilekatkan berbagai nilai demokrasi dalam pengelolaan partai.

Pelebagaan partai politik juga dilakukan dengan menguatkan daya saing partai yakni yang berkaitan dengan kapasitas atau tingkat kompetensi partai untuk berkompetisi dengan partai politik lain dalam arena pemilu maupun kebijakan publik. Daya saing yang tinggi dari partai ditunjukkan oleh kapasitasnya dalam mewarnai kehidupan politik yang didasari pada program dan ideologi partai sebagai arah perjuangan partai. Secara teoretik, daya saing partai berarti kapasitasnya untuk memperjuangkan program yang telah disusun. Partai yang demikian seringkali dianggap memiliki identitas partai programatik. Dengan demikian, secara keseluruhan pelembagaan partai dapat dilihat dari seberapa partai memperkuat dirinya dalam hal pengakaran, penguatan legitimasi, pembuatan aturan main, dan peningkatan daya saing.

## **2.6. Penelitian Terdahulu**

Tema kajian penelitian ini adalah mengenai Strategi Partai Politik yang secara khusus juga akan diteliti strategi dan upaya-upaya yang dilakukan Salmawati Jamado dalam memenangkan suara pemilu

Legislatif. Strategi politik telah banyak di bahas pada riset-riset sebelumnya. Namun demikian penelitian ini lebih menitikberatkan pada strategi partai dan juga upaya caleg PPP Salmawati Jamado dalam memenngkan Pemilu Legislatif Kabupaten Majene 2019. Penelitian sebelumnya yang relevan adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu, membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berusaha melacak berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah penelitian saat ini. Disamping itu adalah menjadi syarat mutlak bahwa didalam suatu penelitian ilmiah sedapat mungkin agar menghindar dari cara-cara plagiasi yang mencontek secara utuh hasil tulisan peneliti orang lain. Oleh karenanya demi menjunjung tinggi kode etik penelitian ilmiah maka penulis berusaha mengeksplorasi terhadap berbagai penelitian terdahulu yang mungkin masih memiliki tema yang sama. Tujuannya tidak lain untuk menegaskan penelitian, posisi penelitian dan sebagai teori pendukung guna menyusun konsep berpikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil bacaan dan kajian peneliti terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini yang meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, namun penelitian ini masih

sangat berbeda dengan penelitian tersebut. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan atau keterkaitan dengan kajian penelitian ini antara lain :

1. *Institusionalisasi Partai, Perubahan Konteks Politik Eksternal Dan Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pada Pemilu Legislatif 2019*. Yuri Anshori, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2019. Studi ini dilatarbelakangi dengan keberhasilan PDIP memenangkan Pemilu 2019 dengan perolehan suara 19,33%. Temuan studi ini menunjukkan kemenangan PDIP di Pemilu 2019 merupakan kombinasi dari faktor institusionalisasi partai dan kemampuan dalam merespon dinamika eksternal partai. Dilihat dari institusionalisasi partai, beberapa aspek menunjukkan tingkat institusionalisasi PDIP relatif baik seperti aspek pengakaran di masyarakat dan organisasi. Tingkat institusionalisasi yang relatif baik ini menjadi modal penting internal partai dalam berkontestasi di Pemilu 2019. Sementara dilihat dari aspek eksternal. PDIP berhasil memanfaatkan dinamika eksternal dengan baik seperti, positioning politik, ketokohan Jokowi, strategi marketing politik yang tepat, masalah internal yang menimpa kompetitor dan juga isu kampanye pada Pemilu 2019. Implikasi teoritik menunjukkan tingkat institusionalisasi yang baik menjadi faktor penting kinerja elektoral partai. Keberhasilan mengelola institusionalisasi menjadi modal penting partai untuk memenangkan pemilu. Selain institusionalisasi,

kemampuan partai memanfaatkan dinamika eksternal partai yang berkaitan dengan positioning, marketing politik, figur serta isu juga terbukti memberikan peran besar terhadap kemenangan partai politik di pemilu.

2. *Institusionalisasi Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Pasca Orde Baru. Studi Komparasi antara Partai Massa, Parta Kader dan Partai Catch-All di Tingkat Pusat dan di Tingkat Kota Yogyakarta.* Sulaksono,

Tunjung, Dr. I Ketut Putra Erawan MA, 2007. Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada. Berangkat dari keprihatinan yang mendalam terhadap kinerja partai politik di dalam menjalankan fungsinya sebagai ujung tombak demokrasi di Indonesia. Meskipun secara struktural tidak ada lagi hambatan dari rezim dan sistem politik, namun kinerja partai masih sangat mengecewakan masyarakat yang selama ini karena berharap banyak akan datangnya perubahan lewat partai. Permasalahan lemahnya kinerja partai ini nyaris selalu ditinjau dari segi organisasi, padahal penulis melihat ada persoalan besar yang ada di balik organisasi partai yang modern sekalipun, yaitu institusionalisasi. Dari analisis data, dapat disimpulkan bahwa pertama, partai-partai di Indonesia belum dapat digolongkan sebagai partai yang sepenuhnya terinstitusionalisasi, terutama dari segi pendanaan dan penanaman nilai yang hingga kini masih sangat memprihatinkan. Kedua,

perbedaan karakter partai dalam beberapa hal juga berpengaruh terhadap derajat institusionalisasi partai. Ketiga, Perbedaan konteks yang dihadapi partai juga akan berpengaruh terhadap institusionalisasi partai politik di Indonesia.

3. Mekanisme Penjaringan Partai Demokrat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Adil Fadly, Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mekanisme penjaringan partai demokrat pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar 2018 dengan menganalisis dua rumusan masalah yaitu mengetahui dan menganalisis mekanisme proses penjaringan calon walikota dan wakil walikota Makassar Partai Demokrat serta menjawab alasan mengapa partai demokrat tidak mengusung kadernya sendiri pada pemilihan walikota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan study kasus terkait dengan kegagalan Partai Demokrat dalam mengusung kadernya.
4. Bertahan dan Menang : Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan. Bias Fajar Lagabuana<sup>1</sup>, Sukri<sup>2</sup>, Haryanto<sup>3\*</sup>. Departemen Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin JURNAL TRANSFORMATIVE Vol. 7 No. 2 Tahun 2021 Hasil penelitian ini menemukan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi strategi politik dari Sri Rahmi yang berasal dari



kekuatan personalitas, jaringan sosial, dan partai politik. Artikel ini berkontribusi dalam memahami mengapa dan bagaimana aktor politik lokal dapat terus bertahan dan menang dalam kontestasi politik lokal di Indonesia kontemporer. Artikel ini mengkaji strategi dan modal politik aktor yang telah berhasil mempertahankan kekuasaannya. Studi bertahannya kekuasaan dalam politik lokal di Indonesia selalu diidentikkan dengan praktik politik dinasti. Akan tetapi pada artikel ini, kami menemukan bahwa bertahannya kekuasaan tidak selalu bersumber dari kekuatan dinasti. Studi kasus Sri Rahmi merupakan sebuah fenomena yang menarik serta menjadi dinamika yang berbeda dari kajian arus utama mengenai bertahannya kekuasaan lokal yang dominan selama ini. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Sri Rahmi dapat mempertahankan kekuasaannya sehingga terpilih menjadi anggota legislatif selama empat periode berturut-turut.

## **2.7. Kerangka Pikir**

Kerangka pada umumnya yang berarti sebagai penopang atau rancangan. Selain itu, pemikiran dapat diartikan sebagai suatu ide atau gagasan yang perlu dituangkan. Dengan demikian kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang digunakan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan yang sudah dibuatnya. Kerangka pikir ini juga sering disebut dengan istilah kerangka berpikir yang di mana biasanya ditulis dalam bentuk bagan dari bagian-bagian

penting yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Kerangka pikir ini bisa digunakan pada karya tulis yang bersifat ilmiah atau karya tulis yang sifatnya non ilmiah.

Meskipun kerangka berpikir sering digunakan oleh penulis, tetapi dalam penggunaannya tidak mudah. Dengan kata lain, kerangka pemikiran tidak boleh dibuat asal-asalan. Hal ini perlu dilakukan agar karya tulis yang dihasilkan nantinya tetap bagus dan pembaca mudah memahami apa maksud dari tulisan yang sudah dibuat oleh penulis. Dalam membuat kerangka pemikiran, ada beberapa hal perlu diperhatikan, seperti melakukan observasi, melakukan kajian pustaka, dan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan topik pembahasan. Ketiga unsur tersebut harus dipadukan dengan baik agar dengan kerangka berpikir yang baik, bisa menghasilkan karya tulis (ilmiah atau non ilmiah) yang berkualitas.

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk memudahkan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini secara garis besar yang dimaksud yaitu untuk mengetahui strategi politik dan pengaruh kekuasaan dalam upaya meraih suara di Pemilu Legislatif Kabupaten Majene 2019, Dimana berdasarkan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Majene. Partai politik melewati proses dalam memilih calon- calon legislatif termasuk calon legislatif dengan memilih dari kader-kader partai politik itu sendiri dan bisa juga dari eksternal partai. Dalam memilih calon yang

diusung oleh PPP untuk partai politik pastinya memiliki strateginya masing-masing. Setelah partai politik menyusun daftar dan menetapkan calon legislatif yang akan diusung maka proses selanjutnya adalah pendaftaran di KPU Kabupaten Majene di masa tahapan pencalonan, selanjutnya melewati seleksi administrasi dan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS) kemudian ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) untuk selanjutnya dipilih sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Majene pada pemilihan umum tahun 2019.

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran ini biasanya dibuat dalam bentuk gambar atau bagan yang kemudian disusun hingga bagian satu dengan bagian lainnya saling terhubung. Maka dari itu, kerangka pemikiran ini secara umum dapat dikatakan sebagai sebuah alur untuk menyelesaikan suatu karya tulis atau penelitian. Adapun alur yang ada pada kerangka pemikiran ini biasanya dimulai dari topik permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis. Kemudian, masuk ke bagian pengenalan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis membuat kerangka penelitian sebagai berikut :

**SKEMA KERANGKA PIKIR**